

PENINGKATAN PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP IMPLEMENTASI MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMP MELALUI FOCUS GROUP DISCUSSION

**Baiq Nina Ayu¹, Laela Nurul Fitri², Kurnia Wahyuli³, Yosa Lina Marsya Andini⁴,
Junaidi⁵, Hartati Aulia⁶, Nia Aspari⁷, Wardatul Jannah⁸, D. Cantika Rismadi⁹, M.
Abdul Lathif¹⁰, Fitri Aulia¹¹**

[¹](mailto:baiqninaayun@gmail.com), [²](mailto:nurulfitri6383@gmail.com), [³](mailto:nia62018@gmail.com),
[⁴](mailto:ylinamarsyaandini@gmail.com), [¹¹](mailto:fitriaulia@hamzanwadi.ac.id)

Universitas Hamzanwadi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi manajemen dan pengembangan program Bimbingan dan Konseling (BK) di SMP serta mengidentifikasi peluang dan tantangan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan, sekaligus menggambarkan efektivitas metode Focus Group Discussion (FGD) dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap praktik pengelolaan program BK secara nyata di lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam dengan guru BK yang bertindak sebagai pemateri FGD, observasi proses pelaksanaan FGD, serta studi dokumentasi terhadap program BK sekolah. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen program BK di SMP telah berjalan melalui siklus perencanaan berbasis analisis kebutuhan, pengorganisasian peran, pelaksanaan layanan yang beragam, evaluasi sistematis, dan tindak lanjut yang terstruktur. Pelaksanaan FGD terbukti efektif memperdalam pemahaman mahasiswa tentang kompleksitas pengelolaan BK di sekolah menengah pertama. Peluang pengembangan mencakup kebijakan Kurikulum Merdeka (Fase D), perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya perhatian terhadap kesehatan mental peserta didik. Adapun tantangan utama meliputi rasio guru BK yang belum ideal, beban administrasi yang tinggi, keterbatasan sarana, serta stigma yang masih melekat pada layanan BK. Temuan ini diharapkan dapat memperkuat fondasi pemahaman mahasiswa calon konselor serta mendorong inovasi tata kelola melalui formulasi taktis Strategi 100 Hari Penguatan Program BK.

Kata Kunci: Manajemen BK, Pengembangan Program BK, Focus Group Discussion, SMP, Peluang Dan Tantangan.

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of guidance and counseling (GC) program management and development in junior high schools, while identifying the opportunities and challenges encountered, as well as examining the effectiveness of Focus Group Discussion (FGD) in enhancing students' understanding of real-world GC program management practices. A qualitative approach with a case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews with GC teachers who served as FGD presenters, observation of the FGD process, and document analysis of school GC programs. Data analysis followed the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, encompassing data condensation, data display, and conclusion drawing. Data validity was ensured through source and technique triangulation. Findings reveal that GC program management in junior high schools has been implemented through a systematic cycle of needs-based planning, role organization, diversified service delivery, systematic evaluation, and structured follow-up. The FGD method proved effective in deepening students' understanding of the complexities of school counseling management. Development opportunities include the Merdeka Curriculum policy (Phase D), digital technology advances, and growing attention to student mental

health. Key challenges include inadequate GC teacher-to-student ratios, high administrative burdens, limited facilities, and persistent stigma surrounding GC services. These findings are expected to strengthen the foundational understanding of prospective counselor students and encourage innovation in school GC program governance through the formulation of a 100-Day GC Program Reinforcement Strategy.

Keywords: *Guidance And Counseling Management, Program Development, Focus Group Discussion, Junior High School, Opportunities And Challenges.*

PENDAHULUAN

Kompleksitas perkembangan peserta didik di era digital telah menempatkan layanan Bimbingan dan Konseling (BK) pada posisi yang semakin vital dalam ekosistem pendidikan (ASCA, 2019; Kemendikbud, 2014). Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi salah satu arena paling dinamis tempat remaja awal menghadapi berbagai tekanan simultan: transisi identitas, tuntutan adaptasi relasi sosial, regulasi emosi yang fluktuatif, serta gempuran pengaruh negatif media sosial yang tak terbendung (Ulfah & Arifudin, 2019; Hidayat et al., 2020). Dalam konteks inilah, program BK yang terkelola dengan baik bukan sekadar pelengkap, melainkan tulang punggung sistem dukungan perkembangan peserta didik (Gysbers & Henderson, 2012; ASCA, 2019).

Manajemen program BK merujuk pada serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi layanan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan tercapainya tujuan perkembangan optimal peserta didik. Definisi ini menegaskan bahwa kualitas layanan BK tidak semata ditentukan oleh kemampuan interpersonal konselor, melainkan juga oleh seberapa efektif program tersebut dirancang, diorganisir, dan dievaluasi secara berkelanjutan (Gysbers & Henderson, 2012; Kemendikbud, 2014; Hidayat et al., 2020).

Dalam tataran empiris, Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 telah memberikan landasan regulatif yang kuat bagi penyelenggaraan BK di sekolah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan layanan BK sebagai bagian integral dari kurikulum (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014; Badarudin, 2015). Namun, kesenjangan antara kebijakan normatif dan realitas implementasi di lapangan masih menjadi persoalan yang berulang muncul dalam kajian akademik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah masih berjuang dengan rasio guru BK yang tidak proporsional, penugasan beralur birokratis yang bias sebagai "polisi sekolah", minimnya sarana prasarana, serta rendahnya pemahaman komunitas sekolah tentang fungsi esensial BK.

Di sisi lain, kebijakan Kurikulum Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek membuka peluang strategis bagi penguatan peran BK pada Fase D (jenjang SMP). Prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student-centered learning), pengembangan Profil Pelajar Pancasila, serta penguatan kesehatan mental menjadi titik konvergensi antara arah kebijakan pendidikan dan misi BK. Perkembangan teknologi digital turut membuka dimensi baru dalam inovasi layanan, mulai dari e-counseling, penggunaan platform digital untuk asesmen kebutuhan, hingga bimbingan berbasis media sosial (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

Dalam kerangka pendidikan calon konselor, mahasiswa program studi BK dituntut tidak hanya memahami teori manajemen program, tetapi juga mampu menginternalisasi dinamika penerapannya di sekolah nyata. Kesenjangan antara pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi (Kolb, 2015). Salah satu metode yang terbukti efektif untuk menjembatani kesenjangan tersebut adalah Focus Group Discussion (FGD) (Krueger & Casey, 2014).

FGD sebagai metode pembelajaran aktif memungkinkan mahasiswa berinteraksi

langsung dengan praktisi, mendiskusikan kasus nyata, dan mengkonstruksi pemahaman bersama dalam suasana dialogis (Krueger & Casey, 2014; Kolb, 2015). Keterlibatan guru BK berpengalaman sebagai narasumber FGD memberikan perspektif insider yang tak tergantikan oleh teks akademik semata. Metode ini sejalan dengan pendekatan konstruktivisme sosial Vygotsky yang menekankan peran interaksi sosial dalam pembangunan pengetahuan (Hergenhahn & Olson, 2013).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan empat pertanyaan pokok: (1) Bagaimana implementasi manajemen program BK di SMP? (2) Bagaimana pelaksanaan FGD mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap implementasi tersebut? (3) Apa saja peluang yang mendukung pengembangan program BK di SMP? dan (4) Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi dan pengembangan program BK di SMP? Keempat pertanyaan ini diharapkan menghasilkan gambaran komprehensif yang dapat memperkaya diskursus akademik sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pengembangan program BK di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study research) (Creswell & Poth, 2021; Moleong, 2021). Pilihan atas pendekatan ini dilandasi oleh sifat masalah penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang bersifat kontekstual, kompleks, dan tidak dapat direduksi ke dalam angka. Desain studi kasus merupakan pilihan yang paling tepat ketika peneliti ingin menjawab pertanyaan 'bagaimana' dan 'mengapa' terhadap fenomena yang sedang berlangsung dalam konteks kehidupan nyata, khususnya menggambarkan secara holistik proses implementasi manajemen program BK dan pelaksanaan FGD sebagai fenomena yang tidak terpisah dari konteks kelembagaan dan akademiknya (Yin, 2018; Creswell & Poth, 2021).

Lokasi, Waktu, Dan Informan Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada kegiatan FGD mata kuliah Manajemen BK yang diselenggarakan oleh Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Hamzanwadi pada semester genap tahun akademik 2025/2026. Narasumber FGD adalah seorang praktisi sekaligus koordinator guru BK aktif pada tingkat SMP di Lombok Timur yang memiliki pengalaman lebih dari sepuluh tahun dalam pengelolaan program BK. Informan penelitian terdiri atas: (1) guru BK narasumber FGD, (2) mahasiswa tingkat akhir peserta FGD, dan (3) dosen pengampu mata kuliah. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan pertimbangan relevansi pengalaman dan kapasitas untuk memberikan informasi yang kaya (Creswell & Poth, 2021; Moleong, 2021).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan guru BK narasumber FGD guna menggali informasi terperinci tentang implementasi manajemen program BK di lapangan secara leluasa. Kedua, observasi partisipatif selama kegiatan FGD berlangsung untuk merekam dinamika diskusi, pola interaksi mahasiswa-narasumber, dan perubahan pemahaman yang teridentifikasi secara kontekstual. Ketiga, dokumentasi terhadap lembar program kerja, materi presentasi narasumber, rekaman FGD, dan catatan lapangan peneliti, yang berfungsi sebagai sumber data komplementer sekaligus instrumen triangulasi (Creswell & Poth, 2021; Moleong, 2021; Miles et al., 2020).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri dari tiga alur kegiatan simultan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi. Kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian,

penyederhanaan, dan transformasi data kasar dari catatan lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks tematik, dan tabel komparatif. Penarikan simpulan dilakukan secara bertahap dari simpulan sementara menuju simpulan akhir yang diverifikasi melalui pengecekan ulang terhadap data mentah (Miles et al., 2020; Creswell & Poth, 2021).

Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dijamin melalui empat kriteria: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas diuji melalui triangulasi sumber (membandingkan data dari guru BK, mahasiswa, dan dokumen) dan triangulasi teknik (membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi). Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk memastikan kecukupan data dan mengurangi distorsi. Member check dilakukan dengan mengonfirmasi interpretasi peneliti kepada narasumber utama untuk memastikan akurasi representasi data (Creswell & Poth, 2021; Moleong, 2021; Miles et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Manajemen Program BK Di SMP

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen program BK di SMP yang menjadi konteks penelitian ini telah terstruktur mengikuti siklus manajemen yang sistematis. Proses tersebut berjalan sebagai sebuah rantai yang tidak boleh terputus: setiap tahapan menghasilkan input bagi tahapan berikutnya, dan evaluasi menjadi penghubung antara akhir satu siklus dengan awal siklus berikutnya (Gysbers & Henderson, 2012; Hidayat et al., 2020).

Tabel 1. Implementasi Siklus Manajemen Program BK di SMP

Fungsi Manajemen	Bentuk Implementasi	Instrumen/Alat yang Digunakan
Analisis Kebutuhan	Pemetaan profil perkembangan peserta didik Fase D secara menyeluruh berdasarkan aspek sosiokultural daerah Lombok Timur.	Angket kebutuhan, Daftar Cek Masalah (DCM), data akademik, observasi, wawancara.
Perencanaan Program	Penyusunan program tahunan, semester, dan Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) BK berbasis hasil analisis data riil.	Format program tahunan, program semester (PROMES), kalender akademik, dokumen RPL BK.
Pengorganisasian	Pembagian peran pelayanan komprehensif, penyelarasan jadwal masuk kelas, serta koordinasi lintas unsur sekolah dan eksternal.	SK pembagian tugas, notulen rapat koordinasi, sistem alur rujukan (referral).
Pelaksanaan Layanan	Penyelenggaraan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individu/kelompok sensitif budaya, home visit, mediasi konflik sebaya.	Jadwal layanan, daftar hadir, laporan pelaksanaan layanan, media pembelajaran digital/informasi.

Evaluasi	Penilaian proses terhadap aktivitas keterlibatan siswa dan evaluasi hasil keberhasilan jangka pendek layanan secara berkala.	Angket kepuasan peserta didik, lembar refleksi, rekapitulasi data kasus siswa.
Tindak Lanjut	Perbaikan efisiensi tata kelola program, penguatan intervensi prioritas, rujukan kasus (referral) lanjutan.	Laporan tindak lanjut, berkas prosedur rujukan, draf program kerja hasil revisi.

a. Analisis Kebutuhan sebagai Fondasi Program

Tahap pertama dan paling krusial dalam siklus manajemen BK di SMP adalah analisis kebutuhan (need assessment). Program BK yang tidak berakar pada kebutuhan nyata peserta didik akan kehilangan relevansinya dan berpotensi menjadi kegiatan administratif semata (Gysbers & Henderson, 2012; Kemendikbud, 2016). Dalam praktiknya, analisis kebutuhan dilakukan melalui instrumen pengumpul data seperti angket siswa, Daftar Cek Masalah (DCM), analisis data akademik, observasi perilaku remaja awal, serta kajian catatan kasus dari tahun sebelumnya. Hasil analisis ini diklasifikasikan berdasarkan bidang layanan (pribadi, sosial, belajar, karier) dan tingkat urgensi wilayah (Kemendikbud, 2016; Kemendikbud, 2014).

b. Perencanaan Program yang Sistematis dan Fleksibel

Hasil analisis kebutuhan selanjutnya ditransformasi menjadi rencana program yang operasional. Perencanaan BK di SMP mencakup empat level dokumen dasar: program tahunan (PROTA), program semester (PROMES), Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL), dan instrumen evaluasi (Kemendikbud, 2016; Kemendikbud, 2014). Yang menarik dari temuan penelitian ini adalah penekanan narasumber pada prinsip fleksibilitas dalam perencanaan. Program BK harus dirancang sistematis namun tetap adaptif merespons isu-isu insidental sepanjang tahun pelajaran, seperti kasus perundungan siber, krisis motivasi, atau kasus putus sekolah mendadak (Gysbers & Henderson, 2012; Hidayat et al., 2020).

c. Pengorganisasian sebagai Proses Kolaborasi Multipihak

Dimensi pengorganisasian memegang peranan vital yang menentukan keberhasilan alokasi layanan. Efektivitas program BK di tingkat SMP sangat bergantung pada kualitas koordinasi antara guru BK dengan kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, dan mitra eksternal (Gysbers & Henderson, 2012; Kemendikbud, 2014). Pengorganisasian diwujudkan melalui rapat koordinasi awal tahun, pembagian batas asuh layanan siswa yang jelas, penyusunan jadwal jam masuk kelas, serta pembentukan mekanisme alur rujukan internal dan eksternal yang terdokumentasi dengan baik (Kemendikbud, 2016; Hidayat et al., 2020).

d. Pelaksanaan Layanan yang Beragam dan Humanis

Dimensi pelaksanaan layanan menunjukkan keberagaman bentuk intervensi yang mencerminkan pemahaman terhadap tugas perkembangan Fase D. Bentuk layanan mencakup bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individu, mediasi konflik antarteman sebaya, bimbingan karier orientasi studi lanjut, hingga tindakan home visit (Kemendikbud, 2014; Kemendikbud, 2016). Penekanan diletakkan pada orientasi humanis di mana konselor dituntut membangun relasi terapeutik yang hangat, penuh empati, bebas dari stigmatisasi, dan menjauhkan kesan BK sebagai institusi penghukum atau "polisi sekolah" (Gysbers & Henderson, 2012; Ulfah & Arifudin, 2019).

Pelaksanaan Focus Group Discussion Dan Peningkatan Pemahaman Mahasiswa

Kegiatan FGD yang menjadi objek penelitian ini dilaksanakan sebagai bagian integral dari mata kuliah Manajemen BK dengan menghadirkan koordinator guru BK praktisi SMP sebagai narasumber. Metode FGD dipilih karena kemampuannya menghadirkan pengetahuan tacit (kearifan praktis lapangan) yang tidak mungkin diperoleh mahasiswa dari

membaca teks akademik perkuliahan semata (Krueger & Casey, 2014; Kolb, 2015). Pengetahuan tacit ini mencakup kearifan taktis tentang cara mengelola hambatan birokrasi, penyelarasan jam masuk kelas yang minim, improvisasi keterbatasan fasilitas konseling, serta penyusunan alur administrasi layanan yang efisien.

Observasi terhadap proses FGD menunjukkan beberapa dinamika penting. Pertama, terdapat transformasi bertahap dalam kualitas pertanyaan yang diajukan mahasiswa: dari pertanyaan yang bersifat definitif-teoretis di awal sesi, menuju pertanyaan analitis-kritis mengenai penanganan kasus sosiokultural daerah di akhir diskusi kelompok. Transformasi ini mencerminkan proses internalisasi pengetahuan yang berlangsung secara real-time (Kolb, 2015; Hergenhausen & Olson, 2013).

Kedua, mahasiswa menunjukkan perubahan perspektif yang signifikan tentang kompleksitas profesi guru BK di SMP. Sebelum FGD, mahasiswa cenderung memiliki gambaran teoretis yang sederhana. Setelah berdialog langsung dan membedah berbagai dilema etis serta beban kerja riil lapangan, mahasiswa mulai mengapresiasi dimensi multifaset dari tata kelola BK. Temuan ini mendukung teori Experiential Learning di mana dialog langsung menjadi basis pembentukan konsep baru yang matang (Kolb, 2015).

Ketiga, FGD memfasilitasi proses refleksi kritis yang mendorong mahasiswa mempertanyakan kembali asumsi teoretis normatif yang selama ini mereka pegang ketika dihadapkan pada keterbatasan sekolah riil. Proses ini menstimulasi pola pikir double-loop learning yang menyentuh level nilai dan pemecahan masalah kreatif (Kolb, 2015). Keempat, efektivitas FGD tampak dari kemampuannya mengintegrasikan pemahaman lintas disiplin, mulai dari psikologi perkembangan remaja awal, manajemen pendidikan, kebijakan kurikulum nasional, hingga kode etik konseling (Krueger & Casey, 2014; Kolb, 2015).

Peluang Pengembangan Program BK Di SMP

Analisis data penelitian berhasil mengidentifikasi lima kluster peluang utama yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat implementasi program BK di tingkat SMP secara progresif:

- a. Kebijakan Kurikulum Merdeka sebagai Peluang Struktural: Kurikulum Merdeka membawa implikasi struktural yang menguntungkan bagi posisi BK Fase D. Prinsip pembelajaran berpusat pada siswa, ruang kolaborasi dalam Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), serta fokus penguatan kecakapan sosial-emosional membuka peluang bagi guru BK untuk mengambil peran proaktif sebagai koordinator pengembangan karakter, bukan sekadar pelaksana pelengkap (Kemendikbud, 2014; Kemendikbud, 2016; ASCA, 2019).
- b. Perkembangan Teknologi Digital sebagai Akselerator Layanan: Transformasi digital membuka ruang inovasi layanan informasi yang fleksibel. Guru BK dapat memanfaatkan alat komunikasi digital seperti Google Form untuk e-need assessment, penyediaan media layanan BK berbasis infografis atau video pendek menarik, hingga pembentukan platform e-counseling (ASCA, 2019; Hidayat et al., 2020). Hal ini terbukti memperluas aksesibilitas bimbingan bagi siswa SMP yang cenderung enggan datang ke ruang BK fisik akibat barrier psikologis (Hidayat et al., 2020).
- c. Meningkatnya Kesadaran terhadap Kesehatan Mental: Pergeseran paradigma masyarakat pasca-pandemi mendorong pengakuan yang lebih besar terhadap pentingnya kesehatan mental remaja. Momentum ini memberikan legitimasi kuat bagi profesi konselor sekolah untuk menggeser model pelayanan dari yang semula bersifat reaktif-kuratif (menangani siswa bermasalah saja) ke arah model preventif-promotif (bimbingan bagi seluruh siswa untuk pencegahan stres dan pengembangan diri) (ASCA, 2019; Kemendikbud, 2014).
- d. Kolaborasi Lintas Profesi dan Institusi: Kompleksitas isu remaja awal menuntut

keterbukaan jaringan. Adanya peluang membangun kemitraan strategis dengan psikolog, dinas perlindungan anak, lembaga kesehatan (Puskesmas), serta perguruan tinggi membantu konselor sekolah untuk bertindak sebagai koordinator rujukan kasus yang andal demi keselamatan perkembangan peserta didik (Gysbers & Henderson, 2012; Kemendikbud, 2014; Kemendikbud, 2016).

- e. Partisipasi Orang Tua yang Semakin Terbuka: Adanya peningkatan kesadaran wali murid untuk membuka ruang dialog bersama sekolah menjadi peluang emas. Program intervensi BK yang melibatkan orang tua melalui forum konsultasi keluarga dan koordinasi grup daring terbukti menghasilkan dampak perubahan perilaku anak yang lebih berkesinambungan antara lingkungan sekolah dan rumah (Gysbers & Henderson, 2012; Kemendikbud, 2014; Ulfah & Arifudin, 2019).

Tantangan Implementasi Dan Pengembangan Program BK Di SMP

Di samping peluang, penelitian ini memetakan tantangan multidimensional yang menghambat optimalnya tata kelola layanan di lapangan.

Tabel 2. Tantangan Implementasi Program BK di SMP dan Dampaknya

Kategori Tantangan	Deskripsi Kondisi Lapangan	Dampak terhadap Kualitas Layanan
Rasio Guru BK Tidak Ideal	Personil guru BK menangani jumlah asuh siswa yang melebihi kapasitas standar normal (bisa mencapai 1:300 atau lebih).	Layanan konseling individual mendalam sulit terlaksana; intervensi cenderung superficial.
Beban Administratif Tinggi	Tumpukan tugas non-BK dari birokrasi, penugasan piket, penanganan kedisiplinan fisik, hingga administrasi umum.	Waktu alokasi untuk layanan substansial preventif berkurang drastis; memicu penyerapan peran (role diffusion).
Keterbatasan Sarana	Kondisi ruang konseling yang minim fasilitas pendukung serta kurang memenuhi standar privasi.	Siswa enggan membuka diri; asas kerahasiaan konseling menjadi terancam dan tidak terjamin.
Stigma "Polisi Sekolah"	Persepsi kultural yang menempatkan ruang BK sebagai tempat penghukuman siswa bermasalah atau melanggar aturan.	Tingkat partisipasi sukarela siswa rendah akibat adanya barrier psikologis ketakutan dilabeli negatif.
Isu Sosiokultural Khusus	Temuan tingginya kerentanan pernikahan anak di bawah umur dan risiko putus sekolah akibat himpitan ekonomi lokal.	Kompleksitas masalah di luar jangkauan akademik; membutuhkan penanganan komprehensif sensitif budaya.
Teknologi Tanpa Kontrol	Maraknya penyalahgunaan gawai, kecanduan game online, dan paparan konten negatif perundungan siber (cyberbullying).	Gangguan fokus belajar, distorsi pola tidur remaja, serta eskalasi konflik sosial baru di media digital.

- a. Krisis Rasio Dan Beban Kerja: Akar Persoalan Struktural

Ketidakseimbangan rasio personel merupakan tantangan struktural yang krusial. Satu guru BK dituntut melayani ratusan siswa, sehingga fokus waktu terserap habis untuk penyelesaian kasus mendadak (responsif). Kondisi kelebihan beban kerja ini berisiko memicu burnout dan compassion fatigue pada konselor, yang pada akhirnya menurunkan

kualitas layanan kelembagaan (Gysbers & Henderson, 2012; Kemendikbud, 2014; ASCA, 2019).

a. **Stigma Dan Role Diffusion: Tantangan Peran Dan Kultural**

Penugasan guru BK pada fungsi penertiban sanksi memicu distorsi peran profesional (role diffusion) dan memperkuat stigma negatif di mata siswa. Mengubah pola kultural ini membutuhkan strategi rebranding tata kelola yang fundamental, seperti mengubah desain kenyamanan ruang BK dan secara konsisten mengampanyekan layanan BK sebagai Pusat Pengembangan Diri yang humanis bagi seluruh siswa (ASCA, 2019; Gysbers & Henderson, 2012; Kemendikbud, 2014).

Pembahasan Integratif: Formulasi Strategi Taktis Mahasiswa

Secara keseluruhan, temuan ini mengonfirmasi bahwa efektivitas program BK merupakan resultant dari interaksi kapasitas konselor, dukungan kelembagaan, dan regulasi kebijakan. Sebagai keluaran (output) langsung dari metode FGD, kolaborasi gagasan dari tim penulis mahasiswa (Nina, Laela, Kurnia, Junaidi, dkk.) berhasil melakukan konseptualisasi teoretis ke dalam langkah praktis melalui perumusan "Strategi 100 Hari Penguatan Program BK di SMP" sebagai modal taktis calon konselor:

- Hari 01-30 (Fase Audit & Pemetaan): Mengelar audit data kebutuhan siswa, merapikan instrumen administrasi layanan dasar, memetakan rekam kasus, serta menyusun alur rujukan (referral) internal bersama wali kelas.
- Hari 31-60 (Fase Eksekusi Prioritas): Melaksanakan layanan bimbingan klasikal tematik prioritas lokal (pencegahan pernikahan dini, literasi digital sehat), serta membangun kemitraan koordinatif aktif dengan wali murid.
- Hari 61-90 (Fase Evaluasi & Intervensi Kelompok): Melakukan penilaian proses dan hasil jangka pendek, serta mengorganisasi konseling kelompok terfokus untuk memecahkan kasus-kasus sejenis yang terdeteksi.
- Hari 91-100 (Fase Refleksi & Akuntabilitas): Menyajikan laporan akuntabilitas dampak layanan kepada kepala sekolah, merevisi program kerja, dan memantapkan komitmen sistemik jangka panjang.

Formulasi taktis ini membuktikan bahwa FGD berhasil menjembatani kesenjangan kompetensi aplikatif mahasiswa secara signifikan. Negosiasi antara pemahaman ideal kurikulum perkuliahan dengan kompleksitas realitas lapangan Lombok Timur melatih mahasiswa melahirkan solusi tata kelola yang adaptif, berbasis data, dan sensitif budaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan empat simpulan pokok. Pertama, implementasi manajemen program BK di SMP berjalan melalui siklus sistematis yang interaktif meliputi analisis kebutuhan, perencanaan fleksibel, pengorganisasian kolaboratif, pelaksanaan layanan humanis, evaluasi berkala, serta tindak lanjut. Kedua, metode FGD terbukti secara empiris meningkatkan pemahaman aplikatif mahasiswa calon konselor melalui transfer kearifan lapangan (knowledge tacit) dan stimulasi refleksi kritis. Ketiga, peluang pengembangan program terbuka lebar lewat integrasi Kurikulum Merdeka Fase D, pemanfaatan inovasi media teknologi digital, serta peningkatan kesadaran kesehatan mental publik. Keempat, tantangan yang dihadapi bersifat multidimensional mulai dari hambatan struktural rasio personel dan sarana, distorsi beban administrasi birokrasi, hingga isu sosiokultural khas pernikahan anak dan kontrol media sosial. Penanganan efektif membutuhkan pembenahan sistemik di level kebijakan alokasi sumber daya kelembagaan, yang diimbangi kesiapan formulasi taktis kerja dari konselor di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- American School Counselor Association (ASCA). (2019). *ASCA national model: A framework for school counseling programs* (4th ed.). American School Counselor Association.
- Asni, & Rahmadina, A. (2026). Manajemen Layanan Bimbingan dan Konseling Berbasis Analisis Beban Kerja Guru: Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 20962-20972.
- Badaruddin, A. (2015). Langkah awal sistem konseling pendidikan nasional: Analisis permendikbud no. 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah. CV Abe Kreatifindo.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Gysbers, N. C., & Henderson, P. (2012). *Developing and managing your school guidance and counseling program* (5th ed.). American Counseling Association.
- Hergenhahn, B. R., & Olson, M. H. (2013). *An introduction to theories of learning* (9th ed.). Pearson Education.
- Hidayat, W., Suryana, Y., & Fauziah, F. (2020). Manajemen Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 14(2), 346-354.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Pertama (POP BK SMP)*. Jakarta: Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed., revised). Pearson Education.
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2014). *Focus groups: A practical guide for applied research* (5th ed.).
- Mardiah, S. A., Neviyarni, S., & Syukur, Y. (2025). Challenges and Supporting Factors in the Management of Guidance and Counseling in Indonesian Secondary Schools. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(5), 176-179.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. (2024). *Laporan Profil Kemiskinan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur*. Selong: Bappeda Lombok Timur.
- SAGE Publications.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Alfabeta.
- Ulfah, U., & Arifudin, O. (2019). Peran konselor dalam mengembangkan potensi peserta didik. *Jurnal Tahsinia*, 1(1), 92-100.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.